

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Karya Tulis, Sumber lainnya

- Andra Tersiana. (2018). Metode Penelitian. Penerbit Yogyakarta.
- Andriani, G. (2020). Tinjauan atas Pengadaan Renovasi Interior KPPN Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018.
- Arsana, I. P. J. (2016). Manajemen PBJP. Deepublish.
- BETHAM, A. A. A., HIPAN, N., & FALITY, F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 191. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.398>
- CR, P. Y. P. (2019). Pengaturan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pemotongan Pajak Penghasilan serta Pelaporannya dalam Mendorong Pengadaan Barang dan/Jasa yang Lebih Baik.
- Farida, M. H. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. 1(1), 305. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2011). “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal Pengadaan*. Vol.1, no. 1.
- Nasution, S. (2010). Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar. Bumi Aksara.
- Siadari, R. (2021). Analisa Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Menurut Perpres No.16 Tahun 2018.
- Syaibani, R. (2012). Studi Kepustakaan, (Online). (<http://repository.usu.ac.id/bitstream>, diakses 7 Mei 2022).

Peraturan atau Dokumen Publik

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 2018. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 2018. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 2018. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Kementerian Keuangan. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.